

**STUDI ATAS PENYUSUNAN DAN PENGGUNAAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
SEBAGAI SEBUAH DAERAH OTONOM BARU**

Sany Heldria Tetmilay

Abdul Halim

ABSTRACT

Theoretically, financial report has many benefits. However, the phenomenon happened to indicate that the Regional government managing the financial statement is only to comply the terms of legislation. Regional Government has only focuses on getting BPK RI opinion, so that they does not get any advantage from the financial statements.

This study aims to identify and analyze the level of understanding of financial managers in MBD Regional District Government related to the forming and use of financial statements. Data collection techniques used is literature study, documentation and field research. Field research used by interview and observation. The data obtained from the literature research and field research analyzed using qualitative descriptive method. According to Miles and Huberman (1984) in Sugiyono (2014: 334) the data analysis process has done in three stages: data reduction, data display, and conclusion drawing/verification.

The research conducted using qualitative research methodology in design case study at MBD Regional District Government. Data analyzed using thematic analysis. The result showed that the level of understanding of financial management related to the preparation and using financial statements is still low. This can be seen in the answers of the resource who do not understand about the preparation and using of financial statements in SKPD. The financial statements have not been used effectively in the financial management process. This caused the level of understanding of the management apparatus is still low regarding the advantage of using the financial statements.

The analysis also showed that the encouragement in preparation of LKPD based on the mechanism of *coercive isomorphism* while forming the SKPD financial statements driven by *mechanism and normative isomorphism*. Encouragement or motivation in use of SKPD financial statements based on the *coercive isomorphism mechanism*.

Keywords : Forming Financial Statement of Regional Government, Forming SKPD Financial Statement, Using of Financial Statement , Financial Managing , Institutional theory isomorphism

**STUDI ATAS PENYUSUNAN
DAN PENGGUNAAN
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT
DAYA SEBAGAI SEBUAH
DAERAH OTONOM BARU**

1. Pendahuluan

Otonomi dan desentralisasi yang luas kepada Pemerintah Daerah membawa konsekuensi logis berupa pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam menggunakan dana baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dana yang dihasilkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Tanggung jawab yang muncul sebagai implikasi dari otonomi daerah menuntut pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap dana yang dikelola olehnya. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menggunakan akuntansi dalam proses pengelolaan keuangan. Akuntansi digunakan sebagai alat pengelolaan keuangan.

Sebagai daerah baru, Pemerintah Daerah Kabupaten MBD masih sangat tertinggal dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam pengelolaan keuangan tersebut. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik,

dibutuhkan tenaga-tenaga akuntansi terampil pada Pemerintah Daerah. Regulasi pemerintah yang berubah terlalu cepat juga membuat kualitas pelaporan keuangan daerah menjadi kurang mengembirakan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Akuntabilitas dan transparansi merupakan syarat utama terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Bastian [2010:401]). Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian (Halim [2012:47]). Laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Laporan keuangan disusun oleh setiap tingkatan entitas akuntansi (SKPD) dan kemudian dikonsolidasikan ke dalam suatu laporan keuangan entitas pelaporan.

Regulasi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Penilaian Kinerja
7. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Laporan Keuangan

2.2.1.1. Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo [2002:160]). Laporan keuangan sektor publik lebih berfokus pada faktor finansial dan politik. Laporan keuangan tersebut harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum diberikan kepada parlemen dan masyarakat luas. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik (Bastian [2010:297]). Laporan tersebut tidak berfokus pada organisasi secara keseluruhan, tetapi lebih berfokus kepada unit kerja pemerintah sebagai bagian dari organisasi.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, paragraf 9, (PP No. 71/2010)

dinyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dan laporan tersebut perlu diaudit untuk menjamin telah dilakukan *true and fair presentation*.

2.2.1.2. Tujuan Laporan Keuangan

PSAP No. 1, paragraf 9 (PP No. 71/2010) secara umum tujuan utama laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sementara secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

- e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Menurut Mardiasmo (2002:162) tujuan umum penyajian laporan keuangan pemerintah adalah:

- (1) Memberikan informasi yang berguna dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
- (2) Memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Halim (2007), secara garis besar tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah:

- a) Memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*);
- b) Memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Sementara secara khusus tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah:

- a) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah;
- b) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksikan kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya;
- c) Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati dan ketentuan lain yang diisyaratkan;
- d) Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh kepemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional;
- e) Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional antara lain;

1. Untuk menentukan biaya program, fungsi dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya dan kinerja unit pemerintah lain;
2. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program aktivitas dan fungsi tertentu di unit pemerintah;
3. Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan target;
4. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan (*equity*)

2.2.1.3. Peranan Laporan Keuangan

Pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan paragraf 24 sampai 25 PSAP menyatakan bahwa:

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas, Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam

rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

- b. Manajemen, Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi, Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d. Keseimbangan antar generasi (*intergrational equity*). Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
- e. Evaluasi Kinerja Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari suatu proses akuntansi berfungsi sebagai salah

satu media informasi yang dipakai dalam pengambilan keputusan untuk (a) membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, (b) menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, (c) membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta (d) membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas (Mahmudi [2010:3]).

2.2.1.4. Jenis Laporan Keuangan

Menurut PP 71 Tahun 2010 dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan paragraf 60, jenis laporan terdiri dari:

1. Laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*)
Laporan pelaksanaan anggaran terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
2. Laporan Finansial
 - a. Neraca
 - b. Laporan Operasional (LO)
 - c. Laporan Arus Kas (LAK)
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

2.2.1.5. Pemakai Laporan Keuangan

Menurut Halim (2007:97) terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, antara lain:

1. Masyarakat.

2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa.
3. Para donator, kreditor dan investor.
4. Pemerintah
5. Para pembayar pajak

2.2.2. Teori *Institutional Isomorphism*

Institutional isomorphism memiliki 3 mekanisme yaitu:

1. *Isomorphism coercive*
Isomorphism coercive adalah proses perubahan berasal dari paksaan atau tekanan dari pihak tertentu.
2. *Isomorphism mimetic*
Isomorphism mimetic adalah proses perubahan yang terjadi karena “peniruan”.
3. *Isomorphism normative*
Isomorphism normative adalah proses perubahan yang muncul dari profesi (profesionalisasi). Perubahan ini terjadi karena organisasi merasa perlu atau patut untuk melakukan hal terbaik sebagai bentuk sikap profesionalitas.

2.2.3. Penelitian Terdahulu

Peneliti yang melakukan penelitian terkait penyusunan dan penggunaan laporan keuangan masih relatif sedikit. Beberapa penelitian telah dilakukan terkait penggunaan laporan keuangan antara lain:

1. Francissca (2014) meneliti Pengaruh Pengetahuan Akuntansi dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan. Jenis penelitian Fransisca digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD kota Padang.

Penelitian Fransisca memiliki kemiripan dengan penelitian ini pada aspek pemanfaatan laporan keuangan.

2. Fontanella (2010) meneliti tentang Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengetahuan Akuntansi Pengguna Terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jenis penelitian ini menggunakan *mixed method* karena menggabungkan tahap kuantitatif dan kualitatif. Tahap kuantitatif dilakukan dengan menguji pengaruh variabel independen latar belakang pendidikan dan pengetahuan akuntansi terhadap pemanfaatan LKPD sebagai variabel dependen. Tahap kualitatif dilakukan dengan wawancara kepada kepala SKPD. Penelitian Fontanella memiliki kemiripan dengan penelitian ini dari aspek pemanfaatan laporan keuangan serta penggunaan wawancara sebagai metode pengambilan data.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metodologi penelitian kualitatif dengan desain studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten MBD. Studi kasus merupakan suatu cara penelitian terhadap masalah empiris dengan mengikuti rangkaian prosedur yang telah dispesifikasikan sebelumnya (Yin [2013:21]).

3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten MBD dengan berfokus pada proses

penyusunan dan penggunaan laporan keuangan tahun 2014.

3.2 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah kepala SKPD yang mengelola dana besar pada Pemerintah Daerah Kabupaten MBD. Informan berjumlah 11 orang yang semuanya merupakan pria dengan tingkat pendidikan 4 orang informan berijazah S-2 dan 7 orang informan berijazah S-1 dengan masa kerja rata-rata di atas 12 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa para informan memiliki pengalaman dan pemahaman yang cukup terhadap penyusunan dan penggunaan laporan keuangan pada SKPD.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data mengenai penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 3 pendekatan yakni: studi kepustakaan, dokumentasi, dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan observasi dan wawancara.

3.4 Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian pustaka dan penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Langkah-langkah dalam melakukan analisis data kualitatif dijelaskan secara baik dalam Creswell (2012), seperti mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis lebih lanjut. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014:334) mengemukakan bahwa aktivitas dalam data kualitatif dilakukan dengan *data reduction*, *data display*, dan *conclusion*

drawing/verification. Reduksi data pada penelitian ini menggunakan analisis tematik. Analisis tematik digunakan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran tentang fenomena yang dikaji

4. Pemaparan Temuan

Kualitas LKPD sangat ditentukan dari validitas Laporan Keuangan SKPD sebagai bahan utama dalam penyusunannya. Untuk menjamin validitas tersebut, maka perlu diadakan rekonsiliasi terutama pada akun yang memiliki nominal signifikan dengan akun lainnya seperti akun belanja, pendapatan dan aset tetap.

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan diperoleh temuan-temuan antara lain:

1. Pengelola keuangan Kabupaten MBD tidak memahami konsep sehingga proses penyusunan laporan keuangan masih mengandalkan SIMDA dan diasistensi oleh BPKP perwakilan provinsi Maluku.
2. Proses penyusunan laporan keuangan hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu baik pada tingkat SKPD maupun pada tingkat Pemerintah Daerah.
3. Penyampaian laporan keuangan sering terlambat sehingga Kabupaten MBD sering mendapat teguran dari Pemerintah Pusat.
4. Laporan keuangan tidak digunakan dalam proses pengelolaan keuangan. Laporan keuangan hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban. Laporan keuangan yang telah

diperiksa oleh BPK disampaikan kepada DPRD dan diarsip.

5. LHP BPK RI terhadap LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten MBD tahun 2009 sampai 2013 masih mendapat opini *disclaimer*. Beberapa temuan yang ada pada LHP 2009 masih ditemukan pada LHP 2013.
6. Sebagai daerah baru, Pemerintah Daerah Kabupaten MBD masih memiliki hambatan dalam menyusun dan menggunakan laporan keuangan, antara lain:
 1. Kurang SDM
 2. Fungsi Inspektorat belum berjalan dengan baik
 3. Minimnya komunikasi dan transportasi sehingga mengakibatkan kurangnya informasi dari luar terkait regulasi
 4. Minimnya sarana dan prasarana penunjang perkantoran yang tidak mendukung proses penyusunan laporan

5. Pembahasan

Hasil wawancara kepada informan menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat pemahaman dari pengelola keuangan daerah terkait penyusunan laporan keuangan pada SKPD masih rendah (belum memahami). Hal ini dapat dilihat pada jawaban dari 11 informan yang semuanya merupakan kepala SKPD. Dari jawaban 11 informan dapat disimpulkan bahwa hampir semua informan belum memahami tentang penyusunan laporan keuangan pada SKPD. Laporan keuangan tersebut juga belum digunakan secara efektif dalam proses pengelolaan keuangan. Hal ini disebabkan karena tingkat

pemahaman aparatur pengelola yang masih rendah terkait manfaat penggunaan laporan keuangan. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa penyampaian laporan keuangan yang selalu terlambat merupakan alasan utama laporan keuangan tidak digunakan dalam proses pengambilan keputusan keuangan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa komponen teori *institutional isomorphism* dapat menjelaskan motivasi atau dorongan SKPD dalam penyusunan dan penggunaan LKPD Kabupaten MBD. Hasil analisis menunjukkan bahwa dorongan terhadap penyusunan LKPD didasari pada mekanisme *coercive isomorphism* sedangkan penyusunan laporan keuangan SKPD didorong oleh mekanisme *coercive isomorphism* dan *normative isomorphism*. Dorongan/motivasi terhadap penggunaan laporan keuangan SKPD didasari pada mekanisme *coercive isomorphism*.

6. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

6.1. Kesimpulan

Hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Para pengelola keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten MBD belum memahami tentang penyusunan dan penggunaan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan tingkat pemahaman para pengelola keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten MBD terhadap akuntansi masih sangat rendah.
2. Masalah utama dalam penyusunan dan penggunaan laporan keuangan pada

Pemerintah Daerah Kabupaten MBD adalah masalah SDM.

3. Laporan keuangan belum digunakan dalam proses pengelolaan keuangan karena minimnya pemahaman aparatur pengelola keuangan terkait arti dan peran laporan keuangan dan keterlambatan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan.
4. Proses penyusunan laporan keuangan diasistensi oleh BPKP perwakilan provinsi Maluku dan dilakukan oleh orang-orang tertentu dalam SKPD sehingga tak terjadi pemerataan pemahaman aparatur terhadap penyusunan dan penggunaan laporan keuangan.
5. Penyusunan laporan keuangan SKPD didorong oleh mekanisme *coercive isomorphism* dan *normative isomorphism* sedangkan penyusunan LKPD didorong oleh mekanisme *coercive isomorphism*.
6. Penggunaan laporan keuangan SKPD maupun LKPD didorong oleh mekanisme *coercive isomorphism*.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan dengan kesimpulan di atas, peneliti memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten MBD antara lain:

1. Rekomendasi kepada SKPD
 - a. Perlu adanya sistem regenerasi pegawai yang menangani akuntansi dan pelaporan sehingga tidak terjadi ketergantungan pada staf atau pegawai tertentu.

- b. SKPD hendaknya memberikan ada *reward* dan *punishment* dalam kantor agar menjadi motivasi dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.
 - c. Proses penyusunan laporan keuangan hendaknya terus berkoordinasi dengan DPKAD selaku PPKD.
 - d. Laporan keuangan hendaknya digunakan dalam proses pengelolaan keuangan (perencanaan maupun pengambilan keputusan keuangan) dengan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak berkompeten.
2. Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten MBD
- a. Peningkatan kualitas SDM terkait pemahaman tentang akuntansi
 - b. Pemerintah Daerah hendaknya memberikan ada *reward* dan *punishment* kepada SKPD agar menjadi motivasi dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD.
 - c. Mutasi yang dilakukan hendaknya mempertimbangkan kualifikasi PNS tersebut.
 - d. Fungsi Inspektorat harus dijalankan dalam proses pengelolaan keuangan
 - e. Proses pengelolaan keuangan (perencanaan maupun pengambilan keputusan keuangan) harus menggunakan laporan keuangan agar kualitas keputusan yang diambil menjadi lebih baik.
- f. Hendaknya menambah jumlah pegawai pengelola keuangan atau tidak membebaninya dengan pekerjaan yang lain agar PNS (pengelola keuangan) tersebut dapat fokus pada pekerjaannya saja.
 - g. Hendaknya segera menindaklanjuti hasil-hasil temuan BPK RI

6.3. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya terbatas pada pemahaman pimpinan SKPD terhadap proses penyusunan dan penggunaan laporan keuangan.
2. Keterbatasan waktu penelitian mengakibatkan analisis dilakukan hanya pada 11 kepala SKPD dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten MBD.
3. Tidak semua informan memiliki pemahaman yang luas dan mendalam tentang substansi atau pertanyaan wawancara.
4. Hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasi kepada daerah-daerah lain. Hal ini dikarenakan karakteristik setiap daerah yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2003. *Undang--Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Negara Republik Indonesia.

- Anonim. 2004. *Undang--Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Negara Republik Indonesia.
- Anonim. 2004. *Undang--Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Negara Republik Indonesia.
- Anonim. 2004. *Undang--Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Negara Republik Indonesia.
- Anonim. 2004. *Undang--Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Negara Republik Indonesia.
- Anonim. 2008. *Undang--Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku*. Negara Republik Indonesia.
- Anonim. 2014. *Undang--Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Negara Republik Indonesia.
- Anonim. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Negara Republik Indonesia.
- Anonim. 2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Penilaian Kinerja*. Negara Republik Indonesia.
- Anonim. 2007. *Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*. Negara Republik Indonesia.
- Anonim. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Negara Republik Indonesia.
- Anonim. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Negara Republik Indonesia.
- Anonim. 2013. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*. Negara Republik Indonesia.
- Anonim. 2011. *Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 18 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten MBD*. Negara Republik Indonesia.

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Keuangan Sektor Publik: suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Braun, Victoria., Virginia, Clarke. 2006. *Using Thematic Analysis in Psychology*. Dept. of Psychology University of Auckland, Auckland, NZ and Faculty of applied Science the University of the West England Frenchay campus, Bristol, UK
- Brewer, Garry., Deleon, Peter. 1983. *The Foundations of Policy Analysis*. Homewood: Dorsey.
- Creswell, W. John. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DiMaggio, Powell., Paul J, Walter W. 1983. *The Iron Cage Revisited Institutional Isomorphism an Collective Rationality in Organizational Fields*. American Sociological Review, Volume 48, Issue 2.
- Financial Accounting Standard Board. 1980. *Statement of Financial Accounting Concept No.4: Objectives of Financial Reporting by Nonbusiness Organization*. Stamford, CT: The FASB, December 1980.
- Fontanella, Amy. 2010. *Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengetahuan Akuntansi Pengguna terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Artikel
- Francissca, Connie., Witia. 2014. *Pengaruh Pengetahuan Akuntansi dan Kualitas Informasi Akuntansi terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kota Padang)*. Artikel
- Gudono. 2014. *Teori Organisasi*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada
- Governmental Accounting Standards Boards (GASB). 1987. *Concepts Statement No. 1: Objectives of Financial Reporting*. Norwalk
- Government Accounting Standard Board. 1999. *Concepts Statement No.1: Objectives of Financial Reporting in Governmental Accounting Standar Series Statement No. 34: Basic Financial Statement and Management's Discussion and Analysis for State and Local Governments*, Norwalk.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah. Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

- Halim, Abdul. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik. Seri Bunga Rampai Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Halim, Abdul. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah. Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Halim, Abdul. & Kusifi, M.S. 2013. *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah Keuangan Daerah. Edisi Keempat*. Yogyakarta: Salemba
- IAI. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: IAI
- IFAC. 2000. *IFAC PSC Study 1 tentang Financial Reporting By National Governmental. Governmental Financial Reporting: Accounting Issues and Practices*.
- Keiso, Donald., E., Weygandt, Jerry., J., & Warfield. Terry., D. 2011. *Intermediate Accounting. Volume 1. IFRS Edition. Printed in the United States of America*.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Ritonga, Taufiq., Irwan. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah. Sesuai PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta: Lambaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah.
- Ritonga, Taufiq., Irwan. 2014. *Analisis Laporan Keuangan Pemda*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Satori, Komariah dan Djam'an, Aan. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Suwardjono. 2013. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada
- Yin, K., Robert. 2013. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Rajafindo Persada
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN